

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA DI KALURAHAN TERONG

(Studi Kasus di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi

Daerah Istimewa Yougyakarta)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ADHITYA PRADANA

NIM: 19520019

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

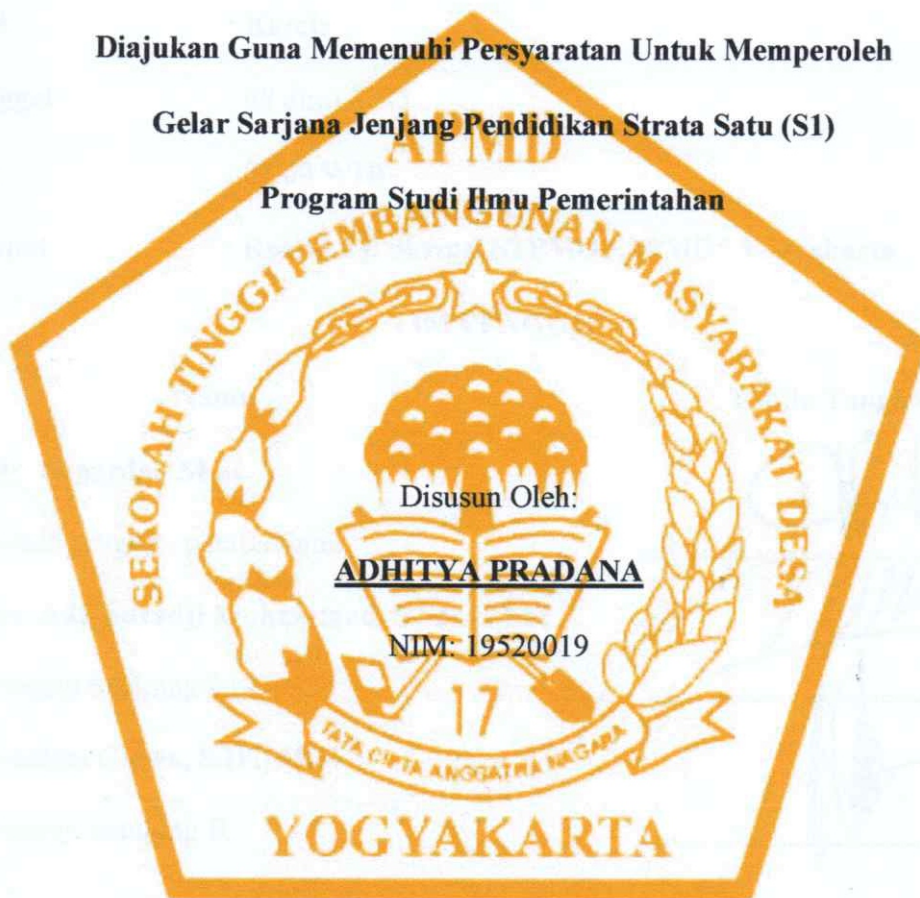
2023

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA DI KALURAHAN TERONG
(Studi Kasus di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi
Daerah Istimewa Yougyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

ADHITYA PRADANA

NIM: 19520019

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



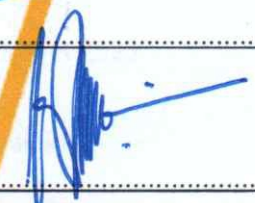


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juni 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Uji Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Supardal, M.Si Ketua penguji / pembimbing	
2. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si Penguji Samping I	
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhitya Pradana

Nim : 19520019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Di Kalurahan Terong" benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is pink and orange, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '20 METERAI TEMPEL' and '6B27AKX548107929'. The signature is a cursive script that loops across the stamp.

(Adhitya Pradana)

19520019

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

(Ralph Waldo Emerson)

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.”

(Sir John Lubbock)

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui.”

(Aristotle Onassis)

“Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan merupakan guru paling hebat untuk menuju sebuah kesuksesan.”

(Adhitya Pradana)

“Alangkah baiknya apabila kita tidak menaruh harapan kepada seorang manusia, karena menaruh harapan kepada manusia adalah seni paling sederhana untuk kecewa.”

(Adhitya Pradana)

“Kepercayaan diperoleh bukan dengan banyaknya perkataan, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.”

(Adhitya Pradana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat penulis sayangi:

1. Kepada kedua orangtua penulis Bapak Suradal dan Ibu Winarsih, yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan serta doa restunya di setiap langkah dalam kehidupan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk bapak dan ibu saya terima kasih atas usaha dan jerih payah dalam membiayai pendidikan kuliah saya dan memberikan fasilitas dalam mendukung dalam pendidikan kuliah. Tentunya hal tersebut menjadikan semangat saya dalam berjuang Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr. Supardal, M.Si, terima kasih bapak yang telah sabar dalam membimbing penulis, terima kasih atas dukungan dan motivasinya yang telah bapak berikan kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tentunya hanya tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak.
3. Kepada Lurah Kalurahan Terong beserta jajaran perangkat, terima kasih telah memberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman teman seperjuangan penulis yang sama sama berjuang menyelesaikan Skripsi ini: Muhammad Raffly, Anggit Dwi, Galuh Kusuma, David Rahmad, Ardian Sunarma, Ilham Wahyu, Cesar Wahyu, Winda Yulianti, Anisa Septiana, Julita

Tarabit, Donartus, Susan, Innocentius Muda, Wiranto Malik, Lusi Ratna, Intan Novi, Sofia Grace, Yuli Wibowo, Oky Febrian, Agus Priyono, Rofiq, Fakhri Hidayah, Reza Fadilla, Andaru Putra, Faruq, Farlin, Hendrik, Ray Palmer, Anggita, dan Yosa. Terima kasih atas kehadiran kalian tentunya memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selamat berjuang di jalan kita masing-masing semoga sukses.

5. Untuk kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, mencari ilmu dan pengalaman untuk menggapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA DI KALURAHAN TERONG**. Penelitian Kualitatif Eksploratif di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik. Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji, yang telah bersedia menguji sidang skripsi ini.

6. Analius Giawa, S.IP., M,Si selaku dosen penguji, yang telah bersedia menguji sidang skripsi ini.
7. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak ilmu dan pengetahuan.
8. Pemerintah Desa dan masyarakat Kalurahan Terong yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Orang tua penulis Bapak Suradal dan Ibu Winarsih yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan, dan doa restunya.
10. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Penulis

(Adhitya Pradana)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Literatur Review.....	7
F. Kerangka Konsep.....	19
1. Desa dan Pemerintah Desa.....	19
2. Sistem Informasi Desa.....	23
3. Pembangunan.....	25
4. Pelayanan Publik.....	27
5. Konsep Smart Village.....	31

G. Fokus Penelitian.....	35
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	41
A. Profil Kalurahan Terong.....	41
1. Letak Geografis.....	44
2. Luas Wilayah.....	45
3. Data Penduduk.....	46
4. Tingkat Pendidikan.....	46
5. Susunan Organisasi Pemerintahan.....	44
B. Profil Sistem Informasi Desa Kalurahan Terong.....	47
BAB III ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA DI KALURAHAN TERONG.....	52
A. Pembangunan.....	53
B. Pelayanan Publik.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Informan.....	37
Tabel 2.1. Data Penduduk.....	45
Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 2.3. Susunan Organisasi Pemerintah.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kalurahan Terong.....	44
Gambar 2.2. Website Kalurahan Terong.....	49

INTISARI

Perkembangan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi. *Smart village* merupakan turunan dari konsep *smart city* yang lebih dulu menerapkan era 4.0 dalam pembangunan wilayah perkotaan. Selain itu *smart village* merupakan salah satu inovasi dalam memajukan perkembangan suatu desa dengan berbasis teknologi informasi dalam mengetahui permasalahan pada kawasan *rural*. Kalurahan Terong merupakan salah satu kalurahan di Kabupaten Bantul yang telah menerapkan *smart village* dari tahun 2012 hingga sekarang dengan berbasis teknologi informasi pada pemerintahan. Masalah tentang lambatnya pelayanan dan informasi sampai kepada masyarakat membuat pemerintah Kalurahan Terong harus berpikir keras untuk mencari jalan keluarnya. Dimana penerapannya tersebut sebagai upaya untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengakses data penduduk selain itu juga memudahkan masyarakat serta orang-orang untuk melihat beberapa informasi Kalurahan Terong. Rumusan masalah bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kalurahan Terong.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Dengan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Penelitian eksplorasi merupakan sebuah studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam hal pemantapan konsep yang akan digunakan dalam berbagai ruang lingkup. Sebuah penelitian yang lebih luas dengan menggunakan jangkauan konseptual yang lebih besar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Terong dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa menjadi media transparansi laporan realisasi APBDes seperti di website Kalurahan Terong dengan menunjukkan hasil yang sudah dilaksanakan. Bentuk dari sistem informasi desa yang ada di Kalurahan Terong dalam mengelola informasi desa melalui media, seperti di *website*, *facebook*, dan *instagram* kalurahan. Namun, hambatan yang dirasakan oleh admin SID tentang website kalurahan yang masih dikelola oleh pihak kabupaten, pihak kalurahan tidak bisa mengkombinasi berbagai macam tampilannya supaya lebih menarik saat diakses warga. Disimpulkan dalam pengelolaan SID di Kalurahan Terong sudah ada tim khusus yang mengelolanya sehingga berita tentang desa dapat cepat di update ke *website* kalurahan, *facebook*, dan *instagram* kalurahan jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama seperti dulu yang masih manual, dengan adanya SID ini dapat mempermudah pemerintah kalurahan dalam memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan.

Kata kunci: *smart village*, informasi, SID

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks pemerintahan perkembangan teknologi informasi ini dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* serta menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis pada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (Yunita & Aprianto, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Pada kemajuan teknologi informasi ini dijadikan sebagai pemanfaatan jaringan internet ini memungkinkan orang bisa mengakses dan memperoleh data secara bersama-sama melalui jaringan yang terhubung, era globalisasi dan teknologi menjadi semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat untuk berbagai bidang.

Perlunya teknologi informasi bagi masyarakat, terutama masyarakat desa perlu informasi yang cepat dan tepat agar mereka tidak tertinggal. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif guna memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau masyarakat, hak masyarakat atas akses informasi publik harus dijamin perlindungan dan kebebasannya. Sistem informasi desa untuk masyarakat, dengan kemajuan teknologi dapat digunakan dalam pembangunan desa atau masyarakat dari suatu kondisi yang kurang baik menuju pada kondisi yang lebih baik, dalam pembangunan desa dibutuhkan peran komunikasi dan informasi. Dengan *smart village* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Begitu pentingnya *smart village* tersebut jika dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan konsekuensi kepada pemerintah desa untuk menjalankan kemandirian desa. Hadirnya undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintah yang mengembangkan kemandirian dan berhak memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat pada masing-masing desa. Dimana undang-undang tersebut secara tegas memberikan kekuatan bahwa pemerintah desa ditempatkan sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam pembangunan. Pemerintah desa juga sekaligus sebagai perencana pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhan desa itu sendiri. Disini pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan harus memiliki kemampuan bekerjasama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahan diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Desa memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pada pembangunan pedesaan ini menjadi fokus utama, karena masyarakat pedesaan tidak mendapat manfaat yang berarti dari adanya pembangunan di perkotaan (Pranadji dan Hastutu, 2004).

Smart village ini turunan dari konsep *smart city* yang lebih dulu menerapkan era 4.0 dalam pembangunan wilayah perkotaan. Selain itu *smart village* merupakan salah satu inovasi dalam memajukan perkembangan suatu desa dengan berbasis teknologi informasi dalam mengetahui permasalahan pada kawasan *rural*. Dalam konsep ini tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penerapan konsep “*smart*” pada pedesaan didasari oleh argumen bahwa desa sebagai unit pemerintahan terendah juga memerlukan pembaruan terhadap perkembangan teknologi informasi yang akan mendorong kecepatan pembangunan program *smart city* dan untuk melawan asumsi-asumsi buruk tentang desa (Aditama, 2018; Badri, 2016; Mayoan, 2016).

Konsep *smart village* yang digunakan oleh pemerintah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan desa yang beranekaragam. Namun, penerapannya masih belum dilakukan secara maksimal dan masih ditemukannya kajian teoritis dengan implementasi karena terkendala oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan desa (Subekti & Damayanti, 2019). Program lain dalam memberdayakan masyarakat desa dengan memaksimalkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan daya saing desa juga dilakukan dengan penerapan konsep desa berbasis teknologi informasi. Pada desa di Indonesia sekarang sudah banyak dilakukan, namun tidak semua desa berhasil mengembangkan ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Disini yang menjadi masalah bukan tentang belum adanya jaringan internet tapi dalam pembangunan desa berbasis teknologi informasi kendala yang sering terjadi biasanya karena kurang berpotensi desa untuk memenuhi beberapa aspek pendukung *smart village*.

Kalurahan Terong merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang telah menerapkan *smart village* dari tahun 2012 hingga sekarang dengan berbasis teknologi informasi pada pemerintahan. Dimana penerapannya tersebut sebagai upaya untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengakses data penduduk selain itu juga memudahkan masyarakat serta orang-orang untuk melihat beberapa informasi Kalurahan Terong. Pemanfaatan *smart village* dari pemerintah Kalurahan Terong terkait data-datanya sekaligus untuk penyebaran informasi dan untuk pelayanan kepada masyarakat setempat. Untuk yang berupa surat menyurat prosesnya tinggal menginput NIK saja nanti tinggal muncul data masyarakat setempat. Pemanfaatannya juga dapat diintegrasikan

dengan media-media lain seperti: *website*, *facebook* kalurahan, *instagram* kalurahan, poster, dan papan informasi yang dikembangkan oleh Kalurahan Terong.

Pentingnya informasi yang dapat terakses luas juga dilakukan untuk pengembangan potensi desa sendiri. Masyarakat dari desa di daerah lain akan dapat mengakses informasi tersebut. Bahkan dengan adanya sistem informasi ini akan memungkinkan terjalinnya jejaring desa dengan berbagai pihak yang kemanfaatannya untuk pengembangan desa. Dampaknya untuk masyarakat luar yaitu terkait dengan informasi kelurahan dan yang ingin bekerja sama dengan kelurahan misalnya UMKM. Selain itu juga mewujudkan kemandirian desa, maka berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Adapun yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat desa ini adalah pengelolaan aset dan potensi desa, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemanfaatannya tersebut juga sebagai alat bantu bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat adalah bagian dari program penerapan *e-government* yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Inpres Nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika dalam pemerintahan dan Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Secara Elektronik di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang muncul pada kelemahan dari ICT kurangnya pemahaman saat pengelolaan data desa seperti permasalahan pengadministrasian data desa serta data kependudukan, pengelolaan data surat menyurat, pengelolaan data persil, dan yang paling penting adalah pengambilan keputusan perangkat desa jika sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep *smart village* ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata

kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi pemerintah dapat mempertahankan eksistensi kerja semua komponen organisasi. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan konsep *smart village* desa di Kalurahan Terong.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Sedangkan pada penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan metode kualitatif deskriptif, selain itu yang menjadi pembeda dengan penelitian ini ditinjau dari lokasi penelitian juga belum maksimalnya penggunaan *website* di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penerapan konsep *smart village* yaitu *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Pada penelitian terdahulu *website* yang cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa, selain itu *website* desa juga sebagai media pelayanan yang merupakan salah satu jenis layanan dari sistem *e-government*. Hal ini menjadi penting, karena semakin seriusnya pihak pemerintah dalam mengembangkan sistem *e-government* di Indonesia, semakin tingginya persentase pengguna internet. Dengan adanya penelitian terdahulu akan memudahkan penelitian selanjutnya, karena bisa menjadi referensi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kalurahan Terong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Untuk dapat mendeskripsikan potensi pengembangan konsep *smart village*, dapat mengetahui pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat, dan juga untuk mendeskripsikan pemanfaatan dalam pembangunan di Kalurahan Terong.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan di dalam dunia ilmu pemerintahan, serta diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kalurahan Terong dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

E. Literatur Review

Penelitian tentang pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mewujudkan *Smart Village* di Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta oleh Fadjarini

Sulistyowati, Hari Saptaning Tyas, MC. Candra Rusmala Dibyorini, Condrodewi Puspitasari. Pada pengertian *Smart Village* ini adalah desa yang secara inovatif mampu menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pemanfaatan SID dan menemukan faktor-faktor yang mewujudkan *smart village* di Kelurahan Panggunharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan FGD, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya faktor-faktor yang mendorong terwujudnya *smart village* dengan pemanfaatan SID, yakni: 1) Keberadaan SID yang diinisiasi desa dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendataan desa yang lebih akurat dan sebagai media penyampaian informasi dan komunikasi; 2) Prakarsa pemerintah desa dalam mendorong pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa seperti pengolahan sampah dari rumah tangga dan pewarisan budaya lokal melalui lumbung kebudayaan; 3) SID mendorong relasi yang lebih baik antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan untuk mendukung terwujudnya *smart village*.

Penelitian tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa (studi kasus di Kabupaten Lamongan) yang dilakukan oleh Yuniadi Mayowan, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dalam usaha mengaktifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat Desa. Keberadaannya selain dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan,

mendukung pengambilan keputusan dan banyak manfaat lainnya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan penerapan TIK dilihat dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan dan anggaran dan menilai pelayanan melalui IT yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan lokasi penelitian di 4 desa di Kabupaten Lamongan. Hasil temuan penelitian adalah keterbatasan jumlah SDM yang menguasai TIK, belum meratanya jaringan, tercukupinya kebutuhan kelembagaan dan adanya dukungan anggaran dari lembaga yang berwenang dan sistem informasi belum mengakomodir semua kebutuhan layanan dan belum diterapkan di semua desa.

Penelitian tentang pembangunan pedesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (studi pada Gerakan Desa Membangun) oleh Muhammad Badri, dimana pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi media hibrida terbukti mempermudah desa inovatif membangun jejaring dan memberdayakan komunitasnya guna mempersempit kesenjangan TIK, salah satunya adalah melalui Gerakan Desa Membangun (GDM). Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui profil dan program Gerakan Desa Membangun (GDM); (2) Mengetahui paradigma pembangunan pedesaan berbasis TIK yang dijalankan GDM; (3) Mengetahui masalah dan strategi pengembangan TIK di pedesaan; (4) Mengetahui pengembangan media komunikasi pedesaan berbasis TIK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis konten website GDM dan konten *website* desa berbasis *desa.id* yang berafiliasi dan dikembangkan oleh GDM. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) GDM lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan pedesaan yang cenderung *top down* dengan program pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi tepat guna serta perlindungan warga desa; (2) Paradigma pembangunan pedesaan yang dijalankan GDM berbasis TIK dengan mengoptimalkan aplikasi sistem informasi desa dan internet pedesaan; (3) Permasalahan pengembangan TIK berkaitan dengan rendahnya infrastruktur TIK di pedesaan dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan yang diselesaikan dengan strategi pelatihan dan pendampingan; (4) Media komunikasi pedesaan yang dikembangkan adalah *website* desa dengan domain *desa.id*, pengembangan aplikasi *open source*, dan interkoneksi desa.

Penelitian mengenai implementasi *smart village* dalam pengembangan desa wisata telah dilakukan oleh Tia Subekti dan Ratnaningsih Damayanti (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa *smart village* adalah konsep yang diambil atau konsep turunan *smart city* dimana perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Penerapan variabel *smart village* pada penelitian ini mengadopsi variabel *smart city* yaitu *smart economy*, *smart government*, *smart people*, *smart environment*, *smart mobility*, *smart living*, dan *smart energy*.

Penelitian tentang peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi di desa Air Anyir dilakukan oleh Lili Indah Sari, Wisnu Aribowo Probonegoro, Supardi, Parlia Romadiana. Desa Air Anyir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masih minimnya kemampuan dan skill teknologi informasi yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di tingkat remaja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) sebaiknya dimulai sejak dini, (tingkat remaja) dapat berpengaruh pada daya saing individu itu sendiri agar bisa berkompetisi dan bersaing di era globalisasi dan digitalisasi ini. Untuk meningkatkan SDM yang ada di Desa Air Anyir perlu dilakukan pelatihan teknologi informasi guna memberikan kemampuan dalam penguasaan TI serta adanya kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah, tanya jawab, praktik langsung. Sedangkan sasaran adalah tingkat remaja yang ingin memaksimalkan kemampuan komputer serta kemampuan teknologi informasi yang lain seperti pembuatan dan penggunaan email. Hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu: peserta memahami, mengerti dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemanfaatan handphone membuat dan menggunakan email pribadi. Email ini nantinya bisa digunakan untuk mendaftar sekolah, baik di tingkat SMA ataupun tingkat perguruan tinggi. Kegiatan ini cukup berhasil karena adanya jaringan internet yang memadai, yaitu diberikan akses Wi-Fi desa.

Penelitian lain mengenai variabel penerapan *smart village* pada desa-desa di Indonesia telah dilakukan oleh Dian Herdiana (2019) dan menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel pokok *smart village* yaitu *smart government*, *smart community* dan *smart environment* yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan pengembangan *smart village* berupa “*Smart Relationship*” yaitu sinergitas yang terjalin antara ketiga variabel *smart village*, sehingga sinergis satu sama lain dengan berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengertian tentang pengembangan *website* dan sistem informasi desa di Kabupaten Tulungagung oleh Fahrur Roz, Tomi Listiawan dimana pada era otonomi daerah, desa merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan

pembangunan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Masalah yang timbul dan dihadapi adalah minimnya tingkat keterampilan aparatur desa dengan tuntutan masyarakat yang lebih dinamis serta sistem pengelolaan arsip masih bersifat konvensional memicu resiko tinggi. Sejalan dengan agenda reformasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa setiap individu dan organisasi dituntut untuk mengembangkan diri guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Pengelolaan administrasi dan arsip yang konvensional harus diubah menjadi berbasis sistem dan digital. Desa juga perlu mempublikasikan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi tentang desa, disamping perlu untuk melakukan transparansi publik. Berkaitan dengan masalah tersebut, Program pengabdian kepada masyarakat (IbM) khususnya di Desa Bangoandan dan Desa Tulungrejoi memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberikan bantuan pengembangan *website* desa dan sistem informasi untuk mengelola data di desa, sekaligus pelatihan pengelolaan administrasi menggunakan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan. Selain itu kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur desa dengan memberikan workshop dan sosialisasi Undang- Undang ASN tahun 2014. Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk memberikan media untuk mempublikasikan segala potensi yang dimiliki desa, tertatanya pengelolaan administrasi yang telah berbasis digital serta meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur desa. Sebagai hasil program berupa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

Penelitian tentang etika pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi Desa Krangkong oleh Moch Alfani Dwi Aldi Cahyono. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui etika pemanfaatan teknologi informasi di dalam sistem informasi Desa Krangkong kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan kajian literatur terhadap beberapa hasil penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi di dalam sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Informasi adalah salah satu media yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi masyarakat desa Krangkong. Akan tetapi dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan beberapa etika, karena menggunakan Teknologi Informasi pada dasarnya adalah kita berhubungan dengan orang lain, dan berhubungan dengan orang lain membutuhkan kode etik tertentu.

Penelitian tentang pengembangan sistem informasi pendataan penduduk tingkat desa oleh Moch Taufik, Suparno Dedy Prastyo. Sering kita lihat pada sistem informasi data penduduk pada tingkat desa biasanya masih menggunakan sistem yang manual. Hal ini menimbulkan beberapa kendala yang cukup merepotkan, terutama pada ketidakvalidan dan ketidakcocokan data. Sering pula terjadi kendala pada saat pencarian informasi tentang penduduk baru, maupun penduduk yang pindah dari desa tersebut. Demikian pula halnya dengan penyediaan data, misalnya data pekerjaan, data pendidikan, dan data demografi penduduk yang sering tidak *up to date*. Berangkat dari kendala-kendala di atas, maka dibuatlah rancangan suatu sistem informasi kependudukan. Diharapkan sistem informasi pendataan penduduk pada tingkat desa ini akan sangat membantu instansi pemerintah dalam melakukan pendataan penduduk dalam ruang lingkup sebuah desa. Dimana sistem ini akan melakukan proses pendataan seiring dengan proses pengajuan surat-surat kependudukan oleh setiap penduduk yang datang ke kantor kepala desa. Dengan demikian data kependudukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa

harus melakukan pendataan secara langsung ke tempat penduduk tersebut tinggal. Sistem yang dibangun ini dirancang dengan alur dan rancangan antar muka yang sederhana, sehingga dapat dengan mudah digunakan di lingkungan desa, dalam hal ini mengambil contoh di Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Penelitian tentang efektivitas kebijakan penerapan aplikasi sistem informasi desa dan kelurahan (SI-Daleh) di Desa Rapak Lembur oleh Arib Hilmy Raihan, Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si dan Melati Dama, S.Sos., M.Si. pada penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa rapak Lambur diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima yang dilakukan dengan lebih cepat, tepat, akurat, murah dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis model interaktif dan untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling dimana yang menjadi narasumber adalah Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan masyarakat Desa Rapak Lambur. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kertanegara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur sejauh ini sudah sangat efektif. Hal ini dilihat berdasarkan fokus Penelitian yang meliputi pengukuran tingkat efektivitas menurut Siagian dimana pengukuran efektivitas meliputi: sumber daya, dana dan fasilitas penunjang, mutu, jumlah barang atau jasa, batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, dan tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan. Selain itu faktor

penghambat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si- Daleh) di Desa Rapak Lambur yaitu, anggaran operasional dan pengembangan aplikasi.

Penelitian tentang sistem informasi pelayanan surat-menyurat berbasis *web* Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban oleh Masbuhin Faqih. Pada pencatatan dan pengolahan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana pelaksanaannya diawali dari kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Pada aktivitas pelayanan kependudukan, warga diharuskan mengurus surat permohonan yang diinginkan pada kantor desa dengan mengikuti sejumlah prosedur yang berlaku sehingga dalam pembuatan surat surat tertentu akan memakan waktu dan tenaga yang cukup lama. Untuk itu, maka dibuat sistem informasi pelayanan surat-menyurat ini. Pada proses pembuatan Sistem Informasi ini menggunakan metode *waterfall*. Untuk perancangan sistemnya dijelaskan dengan menggunakan DFD dan ERD sebagai alat untuk menggambarkan perancangan database. Sistem informasi pelayanan surat-menyurat ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan Database manajemen sistemnya menggunakan *Mysql*. Serta menggunakan metode *black box* sebagai dasar dari pengujian sistem ini. Sehingga didapat pelayanan surat-menyurat menggunakan *web* yang bisa digunakan oleh penduduk desa palang agar lebih mudah dalam melakukan pembuatan surat.

Penelitian tentang implementasi *website* desa dalam pemberian pelayanan informasi pembangunan oleh Muhammad Fikri Akbar, Fery Hendi Jaya, Erwin Putubasai. Dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut *website* desa sebagai media pelayanan informasi pembangunan, yang merupakan salah satu jenis

layanan dari sistem *e-Government*. Hal tersebut menjadi penting, karena semakin seriusnya pihak pemerintah dalam mengembangkan sistem *e-Government* di Indonesia, semakin tingginya persentase pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi website desa dalam upaya pemberian pelayanan informasi pembangunan pada masyarakat desa. *Electronic Government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan *Information Communication and Technology* (ICT) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono & Mulyanto, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, 1992). *Website* yang cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa, baik efek dalam kajian komunikasi massa (kognitif, afektif, dan konatif) maupun komunikasi interpersonal (keterbukaan, empati, dan sikap mendukung).

Penelitian tentang pendampingan dan pelatihan pengguna *Smart Village* guna meningkatkan pelayanan desa di Pekon Sukanegeri Jaya oleh Heni Sulistiani, Agung Saputra, Auliya Rahma Isnaini, Dedi Darwis, Yuari Rahmanto, Aprian Nuriansah, Aidil Akbar. Dengan adanya perkembangan teknologi menuntut semua pihak untuk dapat mengaplikasikannya di segala bidang. Tak luput pemerintahan desa yang juga harus menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan kegiatan administrasinya dan dalam

hal pelayanan desa. Untuk itu, perlu dikembangkannya aplikasi *Smart Village* bagi desa-desa yang ingin maju. Pada kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan *smart village* bagi masyarakat dan perangkat desa di Pekon Sukanegeri Jaya. Pekon Sukanegeri Jaya telah memiliki aplikasi *smart village* yang siap untuk diterapkan bagi masyarakat dan perangkat desanya. Kantor desanya pun telah dilengkapi dengan wifi atau jaringan internet yang lancar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan perangkat desa untuk menerapkan aplikasi *smart village*. Namun, masyarakat dan perangkat desa belum sepenuhnya memahami dan menerapkan *smart village* dalam pekerjaannya. Maka dari itu, tim pengabdian perlu melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan *smart village* bagi masyarakat dan perangkat desa. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi *smart village* dan terjadi peningkatan dalam hal pelayanan kantor desa.

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam membangun literasi digital aparatur pemerintah desa dalam membangun *Smart Village Governance* (studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) oleh Denny Iswanto. Dalam mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien semakin besar, untuk itu pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan adanya upaya digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik atau yang sering disebut dengan *electronic government* (E-Gov) merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi baik di pusat, daerah maupun di tingkat desa. Diperlukan adanya aparat pemerintah desa yang melek akan teknologi dalam menjalankannya. Berbagai literatur menunjukkan bahwa

sebagian besar aparatur pemerintah desa kurang mampu mengaplikasikan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam Membangun Budaya Literasi Digital bagi Aparatur Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan metode analisis data dari Miles, Huberman Saldana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penggunaan teknologi informasi masih perlu dibangun dalam upaya mewujudkan *smart village* di Desa Mentoro. Yang menjadi faktor pendukung dalam upaya membangun literasi digital bagi pemerintah desa adalah komitmen kebijakan pemerintah kabupaten tuban untuk mengembangkan kapasitas SDM Aparatur pemerintah desa dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, tersedianya sarana prasarana digital dalam menunjang program, dan adanya dana desa yang dapat dianggarkan untuk pengembangan sistem digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa.

Penelitian tentang sistem informasi desa untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perangkat Desa Taman Sari oleh Mugi Praseptiawan, Eko Dwi Nugroho, Amirul Iqbal. Dengan kemampuan literasi digital perangkat desa merupakan salah aspek yang paling utama dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Implementasi sistem informasi desa merupakan bagian kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk penerapan *smart village*. Aplikasi sistem informasi desa yang dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Desa Taman Sari dan Program Studi Teknik Informatika belum berjalan optimal, hal ini karena perangkat desa belum memahami penggunaan Sistem Informasi Desa. Pelatihan penggunaan sistem informasi desa dengan platform *Open SID* dibutuhkan oleh perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan literasi digital

perangkat desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perangkat desa Taman Sari yang merupakan desa binaan Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Metode yang digunakan adalah dengan metode pelatihan dan tutorial yang dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, dan 3) Evaluasi. Hasil kegiatan pelatihan sistem informasi desa perangkat desa taman sari. Hasil dari pelatihan desa Taman Sari menghasilkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa setelah mengikuti seluruh rangkaian materi yang diberikan. Rekomendasi kegiatan disarankan untuk segera mengambil tindakan yang lebih konkret berupa implementasi kegiatan penerapan sistem informasi desa dengan mendorong dikeluarkannya Peraturan Desa Taman Sari tentang penerapan sistem informasi desa.

F. Kerangka Konsep

Dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, berikut akan dikemukakan beberapa konsep sistem informasi desa, konsep desa, konsep pemerintahan desa, dan pembangunan. Berikut akan dibahas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Desa dan Pemerintah Desa

Desa bersumber dari bahasa India Swadesi yang bermakna area asal, area tinggal, negeri asal atau tanah karuhun yang berdasar pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta mempunyai sekat yang nyata. Dalam keseharian, seringkali sebutan ini disangkut pautkan dengan definisi “*rural* dan *village*” serta disetarakan dengan istilah *city* atau *town* (kota) maupun kata urban (perkotaan). Kedua persepsi di atas lebih mengarah kepada individualitas warga, sementara desa serta kota mengacu pada suatu kesatuan

daerah manajemen atau regional di mana apa yang dimaksud dengan perdesaan adalah kumpulan dari desa-desa.

Desa menurut (R.H Unang Soenardjo 2011:4) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota (Bintarto 1983: 11-12).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang ada di desa sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan wilayah tempat tinggal masyarakat hukum dengan kewenangan mengurus pemerintahan atas inisiasi masyarakat guna mengembangkan potensi dan kekayaan baik ekonomi dan budaya yang ada secara mandiri.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada

pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap pengelola rumah tinggal di desanya, memenuhi kebutuhan rakyat banyak di desanya serta mengelola potensi-potensi lokal yang ada sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan manfaat dalam pembangunan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan di desa akan mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugasnya maka pelaksanaan suatu pemerintah desa diperlukan adanya kinerja yang jelas dalam rangka mempermudah pelaksanaan (Widjaja, 2001) Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri dari:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- 2) Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari atas:
 - a) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
 - b) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. (Hanif Nurcholis, 2011:75)

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang terendah yang memiliki visi dan misi, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan pemerintah desa dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri. Selain itu juga pemerintah daerah memiliki standar pelayanan yang dilakukan dengan caranya sendiri, sehingga pemerintah desa dapat menjalankan semua pelayanan dengan prima dan efisien.

2. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa adalah salah satu komponen dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa untuk masyarakat di desa yang keberadaannya dibutuhkan karena berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Pelayanan masyarakat desa

merupakan kegiatan pemerintah desa untuk melayani masyarakat yang berhubungan dengan administrasi dan pembangunan yang ada di desa. Sistem Informasi Desa (Sutoro Eko, 2012 19-20) pada awalnya SIDESA hingga akhirnya menjadi SID memiliki dua pengertian dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas SID diartikan sebagai suatu rangkaian sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas. Setiap desa mempunyai sistem informasi seperti papan pengumuman dan komunikasi lisan namun data tersebut berkembang dalam ukurannya sehingga dibutuhkan fasilitas lain untuk mengelola agar lebih konseptual dan sistematis.

SID ini berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas dalam menyimpan data, menggali data dan mengelola data tentang desa, aspek efektivitas dan efisiensi ini yang menandai penekanan latar belakang lahirnya SID. Keberlangsungan SID tentunya sangat tergantung dari manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap program tersebut. Konsep SID merupakan informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer dan *web*, sehingga informasi ini dapat di akses oleh warga. Keberadaan SID menurut Combine Resource Institute (Wilhelm Wau: 2012) didasarkan beberapa manfaat, yaitu:

- a) Untuk perencanaan pembangunan, dalam pembangunan menghasilkan rangkaian proses pengambilan keputusan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dengan adanya sistem informasi desa, maka desa memiliki pusat data

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) perencanaan;

- b) Untuk keterbukaan informasi, sistem informasi desa telah membuka budaya-budaya transparansi informasi yang selama bukan lagi penghambatan dalam berkomunikasi ini tampak tertutup. Dengan adanya SID maka terjadi keterbukaan informasi yang memungkinkan peran dan status;
- c) Untuk pendataan kemiskinan, dengan model partisipatif maka kemungkinan dilakukan pendataan kemiskinan di tingkat desa yang lebih akurat;
- d) Untuk pelayanan publik, dengan adanya SID maka data-data kependudukan, data keuangan desa maupun sumber daya desa akan tersimpan dalam database. Hal ini memungkinkan desa memberikan pelayanan yang lebih akurat dan cepat untuk permohonan surat-surat dari warga.

3. Pembangunan

Salah satu sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksanaan otonomi daerah yang diamalkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa (Rogers, 1985: 2). Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang

ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan desa ini, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya. Diantaranya adalah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak langkah awal yakni bermula dari perencanaan hingga proses evaluasinya dimana kesemuanya melibatkan masyarakat dan berangkat dari partisipasi masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud.

Untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah telah dibuat dan diimplementasikan. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat (Kamaluddin Rustian, 2006: 53). Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan.

Diperlukan juga kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

4. Pelayanan Publik

Seluruh kepentingan dari masyarakat (publik) harus dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam berbagai sektor, salah satunya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan pokok dan tata cara yang ditentukan.

Pengertian lain menurut Hardiyansyah (2011:12) pengertian pelayanan publik adalah: Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4-5) pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Lukman (1999:6) menyatakan, bahwa Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan seseorang orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan tersebut tentunya harus berorientasi pada masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas bagi sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah pelayanan. Adapun pelayanan publik yang berkembang saat ini, yakni pelayanan yang berbasis *website*. Menurut Nandari, B.A dan Sukadi (2014) menyatakan dengan menggunakan *website* data yang diolah bisa lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan sistem yang mana data yang diolah secara sering kali mengalami kesulitan. Dengan demikian pelayanan publik saat ini telah bertransformasi ke pelayanan digital atau daring.

Jenis-jenis pelayanan publik Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa macam. Menurut Hardiyansyah (2011:23) jenis pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a) Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

b) Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

c) Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, penanggulangan bencana, pelayanan sosial.

Unsur-unsur pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. Atep Adya Barata (2003:11) mengemukakan pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).
- b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati. Selanjutnya, Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tersedianya karyawan yang baik.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- c) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
- d) Mampu melayani secara cepat dan tepat.
- e) Mampu berkomunikasi.
- f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik.
- h) Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).

5. Konsep *Smart Village*

Konsep desa cerdas atau *smart village* merupakan suatu program yang berawal dari Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengharuskan menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan anggaran desa dan melihat dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka akhirnya tercetusnya suatu program kebijakan yang bernama program *smart village* ini. Program ini suatu inovasi pemerintah dalam memanfaatkan suatu teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparansi, akuntabel dan lebih efektif serta efisien.

Smart village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen komponen atau indikator dari konsep *smart city* namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep *smart village* (Desa Pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Smart village menurut Hasan (2021) merupakan suatu desa yang secara inovatif menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam penerapannya tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga dapat mengembangkan potensi desa dalam berbagai bidang, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbasis teknologi dan informasi. Sedangkan menurut Herdiana (2019) menjelaskan bahwa konsep *smart village*

merupakan konsep desa yang cerdas yang tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi, tetapi mampu mengembangkan potensi desa, meningkatkan ekonomi dan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang berkualitas berbasis informasi. terdapat tiga elemen penting dalam *smart village* yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Ketiga elemen tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan konsep *smart village* yaitu smart relationship yaitu keterjalinan konstruktif yang muncul dari ketiga elemen yang bersinergi menjadi satu dengan berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Indikator *smart village* terdapat 3 (tiga) variabel ketercapaian dalam konsep *smart village* sebagai dasar dari penerapan *smart village* yang sinergis antara ketiga variabel. Berikut merupakan tiga dimensi indikator dalam *smart village*, yaitu:

a. *Smart Government*

Smart Government merupakan sebuah konsep atau langkah lanjutan dari *e-government* yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Tujuan penerapan *smart government* berupaya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. *Smart government* identik dengan adanya penerapan *e-government* atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya, guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik dan pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mewadahi aspirasi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang

pengembangan e-government menyebutkan tujuan pengembangan *e-government* yaitu sebagai suatu upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis elektronik guna memaksimalkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

b. Smart Community

Masyarakat merupakan figur utama dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan desa, bukan sekedar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat desa harus berperan aktif dalam proses pembangunan desa agar dapat merasakan manfaat dari suatu program pemerintahan. Masyarakat perlu menjadikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai peluang untuk mengoptimalkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan desa. *Smart community* adalah komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pebisnis, pendidikan, lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas yang sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan. *Smart community* didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki kepentingan bersama dari lingkungan hingga seluruh komunitas bangsa secara umum dimana anggota, organisasi dan lembaga yang mengatur bekerja sama untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah keadaan secara signifikan.

c. Smart Environment

Kawasan pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya tersendiri yang berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Dalam konsep *smart village* suatu lingkungan bukan hanya

berorientasi pada lingkungan saja, tetapi juga mencakup semua unsur yang menjadi ciri khas desa, yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial di lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan tatanan alam tersusun atas pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya seperti dalam hal pendataan, dokumentasi dan pengidentifikasian potensi alam secara proporsional tanpa merusak tatanan alam. Dalam konsep *smart city* ditegaskan bahwa *smart environment* memiliki karakteristik yang berkaitan dengan efisiensi dan berkelanjutan.

d. Smart Education

Smart education merupakan konsep dan gagasan mengenai integrasi aspek kehidupan sebagai sumber belajar (*learning sources*), materi belajar (*learning material*), dan tujuan pembelajaran (*learning objectives*). Melalui implementasi konsep *smart education* ini, para siswa diharapkan mampu menjadi subjek sekaligus objek pendidikan. Mereka dijamin untuk bebas berpikir dan bereksplorasi terhadap lingkungan dimana dia hidup dan menjalani kehidupan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *smart village* memiliki banyak makna sesuai dengan kebutuhan dalam pemakaiannya, namun *smart village* merupakan suatu alternatif solusi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi demi mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa tersebut.

G. Fokus Penelitian

Pentingnya informasi yang dapat diakses luas juga dilakukan untuk pengembangan potensi desa sendiri. Dengan masyarakat dari desa di daerah lain akan dapat mengakses informasi tersebut. Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan pemerintah Kalurahan Terong dalam pengelolaan dan pemanfaatan konsep *smart village* untuk mendukung serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Dengan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Moleong (2007:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian eksplorasi merupakan sebuah studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam hal pemantapan konsep yang akan digunakan dalam berbagai ruang lingkup. Sebuah penelitian yang lebih luas dengan menggunakan jangkauan konseptual yang lebih besar. Dalam melakukan eksplorasi ini maka konsep yang matang akan menjadi goal dalam penelitian dan juga jangkauan konseptual yang lebih luas Yusuf (2017). Dengan demikian peneliti akan mengumpulkan informasi berkaitan dengan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi indikator kemampuan dalam memanfaatkan Sistem Informasi Desa dalam

pembangunan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Unit Analisis

Unit Analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian (Hamidi: 75-76). Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara sengaja yang terdiri dari beberapa narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang dapat memberikan informasi tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam Pembangunan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah Teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik yang digunakan ketika peneliti mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Menurut peneliti, obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam Pembangunan sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah segala hal yang terkait dengan orang-orang yang memberikan informasi, yaitu:

- a) Pemerintah desa
- b) BPK
- c) Karang taruna
- d) Masyarakat

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Umur	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Sugiyono, SE	42	Lurah	Sarjana	Laki-Laki
2	Vina Aryani, SP.d	38	Carik	Sarjana	Perempuan
3	Kamijo	45	Jagabaya	SLTA	Laki-Laki
4	Daldiri, S.Tr.P	40	Ketua BPK	Sarjana	Laki-Laki
5	Bayu	25	Karang Taruna	SLTA	Laki-Laki
6	Tukiyo	50	Masyarakat	SLTP	Laki-Laki
7	Sarju	50	Masyarakat	SLTP	Laki-Laki
8	Stinem	46	Masyarakat	SLTP	Perempuan

Sumber: Data Lapangan Peneliti 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:308). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan di atas, untuk mengetahui Pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam Pembangunan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Observasi

Sugiyono (2014:145) menjelaskan observasi ini sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Sedangkan menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2014:145) dijelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan tempat lokasi penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap pemanfaatan sistem informasi desa dalam pembangunan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui observasi dan wawancara, peneliti akan menggunakan data dari dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi pemerintah desa, data pegawai, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (1992:16). Terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:

a) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

b) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengekstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilih.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu di verifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil Kalurahan Terong

Saat terjadi geger Suroyudo di Kerajaan Mataram, salah seorang prajurit yang bernama Ki Potrojiwo menyingkir ke bagian timur wilayah kerajaan Mataram dengan membawa serta isteri dan seorang anak perempuannya yang bernama Nyi Jopotro dan cucu laki-lakinya yang bernama Trononggo, anak dari Nyi Jopotro. Setelah Ki Potrojiwo meninggal dan dimakamkan di Gunung Sentono di wilayah Piyungan, Nyi Jopotro bersama Trononggo menyingkir lebih ke timur lagi dari wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Mereka masuk hutan belantara, naik ke gunung yang sekarang disebut Cinomati dan sampailah di sebuah wilayah yang hanya ada semak belukar ditumbuhi tanaman liar terong hutan. Tempat tersebut oleh Nyi Jopotro dinamai sebagai Alas Terong.

Alas Terong yang terletak di perbukitan dan jauh dari pusat kekuasaan Kerajaan Mataram, dipilih oleh Nyi Jopotro dan Trononggo untuk menjadi tempat tinggalnya yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian ada beberapa orang yang kemudian datang ke alas Terong, baik yang datang dari arah barat dan juga dari arah utara dan selanjutnya bertempat tinggal di alas Terong. Berkumpulah mereka menjadi penghuni alas Terong dan melakukan interaksi sosial di sana. Dari interaksi sosial dengan masyarakat di alas Terong, kemudian Trononggo menikahi seorang perempuan dan memiliki dua orang anak, yaitu Trosentono dan Tromenggolo.

Ketika Trononggo telah lanjut usia, dia menunjuk Trosentono untuk menjadi pemimpin masyarakat alas Terong yang disebut Bekel. Menurut beberapa sumber Trosentono menjadi Bekel di Terong yang pertama dan masa tugasnya antara Tahun 1912 sampai dengan 1930, kemudian pada Tahun 1930 kedudukan Bekel Terong digantikan oleh Demang Harjoutomo anak laki laki Trosentono sampai Tahun 1951, setelah Demang Harjoutomo purna digantikan oleh Joyo Wiyarjo anak Mertomenggolo atau cucu dari Tromenggolo. Sejak kepemimpinan Joyo Wiyarjo maka sebutan Bekel berubah menjadi Lurah. Lurah Joyo Wiyarjo memangku jabatan mulai Tahun 1951 sampai dengan 1963. Kemudian sejak Tahun 1963 atas kepercayaan Penewu Kapanewon Kota Gede Sk, lurah Terong di percayakan kepada Harjosuwarno hingga Tahun 1992.

Pada tahun 1974 ketika berdirinya Kecamatan Dlingo maka Kelurahan Terong yang semula berada di wilayah Kecamatan Kotagede Sk, kemudian menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dengan Lurah Harjosuwarno dan purna pada Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 proses demokrasi dalam pengisian lurah desa (Kepala Desa sesuai sebutan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979), menggunakan sistem pemilihan langsung dan dalam proses pemilihan tersebut terpilihlah Sudirman sebagai Kepala Desa Terong masa bakti 1994 – 2002. Setelah selesai masa jabatan Sudirman pada Tahun 2002 dan dilakukan pemilihan Kepala Desa Terong pada tahun tersebut Sudirman terpilih kembali sebagai Kepala Desa Terong (Lurah Desa Terong), melalui proses pemilihan langsung melawan kotak kosong.

Pada bulan Mei 2012 masa kepemimpinan Sudirman S.E sebagai Lurah Desa Terong berakhir, sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Sudirman S.E, BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) desa Terong membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa Terong pada tanggal 06 Maret 2012, dalam Perjalanannya Panitia Pemilihan Lurah sampai ditutupnya masa Perpanjangan Penjaringan Lurah tanggal 25 April 2012. Dengan kejadian tersebut akhirnya BPD desa Terong mengusulkan kepada Camat Dlingo, agar Poniran (Carik), diangkat sebagai Pejabat Lurah Desa Terong mulai bulan Mei 2012. Tanggal 10 Oktober 2012 Panitia Pemilihan Lurah akhirnya membuka kembali Penjaringan Bakal Calon Lurah Desa Terong, yang pada akhirnya mendapatkan 3 nama Bakal Calon yakni, Welasiman, Sukamdani dan Sugiyono S.E. Pada proses pemungutan suara tanggal 4 November 2012, akhirnya Panitia Pemilihan Lurah, mendapatkan calon Lurah terpilih yaitu Welasiman.

Lurah desa Terong yang semenjak bulan Mei 2012 dijabatkan kepada Poniran, akhirnya berakhir pada tanggal 20 November 2012 yang ditandai dengan dilantikannya Lurah Desa Terong hasil Pemilihan, yaitu Welasiman dengan masa bhakti 2012 sampai dengan 2018.

Daftar Lurah atau Kepala Desa Terong dari Tahun 1912- 2024:

- 1) Trosentono (Bekel) (1912 – 1930)
- 2) Demang Harjo Utomo (1930 – 1950)
- 3) Joyo Wiyarjo (1950 – 1966)
- 4) Harjo Suwarno tahun (1966 – 1992)
- 5) Sudirman (1994 – 2002)
- 6) Ngabehi Sudirman Wiro Mandoyo 2002 – 2012 (Sudirman, S.E.) setelah mendapat kekancingan nama dari Kadipaten Pakualaman.

7) Welasiman (2012-2018)

8) Sugiyono, SE (2018-2024)

1. Letak Geografis

Utara : Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan

Timur : Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo

Selatan : Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo

Barat : Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret

Luas Wilayah Desa Terong : 775,8615 Ha

Dengan letak dan batas Desa Terong pada posisi di 07'53'30 garis lintang selatan dan 110'27'32' bujur timur, dengan ketinggian kurang lebih 325-350 M diatas permukaan laut serta suhu udara 22'4'-27'C.

2. Luas Wilayah

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Terong



Sumber: website Kalurahan Terong 2023

Untuk masing-masing luas pedukuhan:

1. Pedukuhan Kebokuning yang terdiri dari 4 RT dipimpin oleh Dukuh Apriyanto Nugroho mempunyai luas 64,0000 H.
2. Pedukuhan Saradan yang terdiri dari 5 RT dipimpin oleh Dukuh Ponirin mempunyai luas 98,0175 Ha.
3. Pedukuhan Pancuranyang terdiri dari 8 RT dipimpin oleh Dukuh Sugiyadi mempunyai luas 120,0000 Ha.
4. Pedukuhan Rejosari yang terdiri dari 4 RT dipimpin oleh Dukuh Kasiyanto, S.T mempunyai luas 88,0000 Ha.
5. Pedukuhan Terong II yang terdiri dari 6 RT dipimpin oleh Dukuh Yuliyanto mempunyai luas 87,0000 Ha.
6. Pedukuhan Terong I yang terdiri dari 2 RT dipimpin oleh Dukuh Apriyanto Nugroho mempunyai luas 7,8000 Ha.
7. Pedukuhan Pencit Rejo yang terdiri dari 5 RT dipimpin oleh Dukuh Sudari mempunyai luas 89,0340 Ha.
8. Pedukuhan Sendang Sari yang terdiri dari 4 RT dipimpin oleh Dukuh Suyadi mempunyai luas 89,0000 Ha.
9. Pedukuhan Ngenep yang terdiri dari 4 RT dipimpin oleh Dukuh Sutaya mempunyai luas 133,0100 Ha.

3. Data Penduduk

Tabel 2.1 Data Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah jiwa	5862

2	Jumlah laki-laki	2952
3	Jumlah perempuan	2908
4	Jumlah kepala keluarga	2084

Sumber: website Kalurahan Terong

4. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ Belum sekolah	1076
2	Belum tamat SD	440
3	Tamat SD/ sederajat	1628
4	SLTP/ sederajat	1223
5	SLTA/ sederajat	1306
6	D1	18
7	D2	-
8	D3	45
9	S-1	120
10	S-2	5
11	S-3	1

Sumber: website Kalurahan Terong

5. Susunan Organisasi Pemerintahan

Tabel 2.3 Susunan Organisasi Pemerintah

No	Nama	Jabatan
1	SUGIYONO, SE	Lurah
2	VINA ARYANI, S.Pd	Carik
3	KEMIJO	Jagabaya
4	RHMAJI S.Pd.S.D	Ulu Ulu
5	WAJAR ALLI KAKKIM, S.Kom	Kamituwa
6	SITA USWATUN KASANAHA, SE	Kaur. Danarta
7	IKA NOLIA MULYANTI, SS	Kaur. Tatalaksana & Umum
8	AGUS KAHARUDDIN	Pangripta
9	APRIYANTO NUGROHO	Dukuh Kebokuning
10	FENDY PRADANA PUTRA	Dukuh Saradan
11	SUGIYADI	Dukuh Pancuran
12	KASIYANTO, ST	Dukuh Rejosari
13	YULIYANTO	Dukuh Terong I
14	GATOT PURWANTA	Dukuh Terong II
15	SUDARI	Dukuh Pencitrejo

16	SUYADI, S.Sos	Dukuh Sendangsari
17	SUTAYA	Dukuh Ngenep
18	SUWOTO	Staf
19	SUMIRAN	Staf
20	EVI RAHMAWATI	Staf
21	AZIS AGUS SAPUTRA	Staf
22	EVI YULIANA, Amd	Staf Honoror
23	DIAN CITRA FITRIANI, SE	Staf Honoror
24	ANANTEA RESIWI, SS	Staf Honoror
25	AGUNG SETYA PRABAWA, ST	Staf Honoror
26	WINTO HIDAYAT	Staf Honoror

Sumber: website Kalurahan Terong

B. Profil Sistem Informasi Kalurahan Terong

Dengan adanya portal pelayanan publik ini memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan mengakses informasi yang disediakan. Portal pelayanan publik ini memudahkan pengunjung dengan hanya mengunjungi sebuah website terdiri dari beberapa aspek informasi pemerintah maupun masyarakat. Pada portal pelayanan publik ini tidak hanya berupa website akan tetapi juga dari berbagai sosial media seperti *facebook* dan *Instagram*.

Awal masuk Sistem Informasi Desa di Kalurahan Terong ini merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2012 hingga saat ini dengan proses yang tidak sedikit. Tujuannya tak lain untuk mempercepat dalam pengelolaan data-data yang ada di kalurahan. Dengan adanya SID ini dapat mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat karena prosesnya yang cepat ketimbang harus mengurus ke kantor kalurahan. Terwujudnya kebijakan SID ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Terong juga transparansi dalam hal informasi, berita, agenda, maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan Terong dapat diakses masyarakat umum. Pada Kalurahan Terong ini sudah ada tim yang khusus untuk menangani SID.

Pengelolaan sistem informasi desa ini juga berfungsi dalam pelayanan surat-menyurat karena sudah terintegrasi dengan data kependudukan disdukcapil. Jadi pemerintah desa tidak perlu repot lagi mengetik data karena datanya sudah ada di data kependudukan. Sehingga dampak dari sistem informasi desa sangat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan pemerintah lebih transparan di mata masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi yang merupakan teknologi masa kini untuk dapat menyatukan atau menggabungkan berbagai informasi, data dan sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi kegunaan seluruh manusia melalui penggunaan berbagai media dan peralatan komunikasi modern.

Sehingga masyarakat akan tahu pembangunan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Disimpulkan dalam pengelolaan SID di Kalurahan Terong sudah ada tim khusus yang mengelolanya sehingga berita tentang desa dapat cepat di update ke *website*, *facebook*, dan *instagram* kalurahan jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama seperti dulu yang masih manual, adanya SID ini dapat mempermudah pemerintah kalurahan dalam memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan. Dengan kelengkapan fasilitas pengelolaan melalui sistem informasi desa pemerintah Kalurahan Terong melengkapi beberapa fasilitas yang diolah pemerintah desa terutama pada sistem informasi desa, karena proses pelayanan bisa berlangsung sangat efisien dan cepat.

Berikut adalah sekilas tampilan portal website Kalurahan Terong:

Gambar 2.2 Website Kalurahan Terong



Sumber: website Kalurahan Terong

Pada gambar tersebut merupakan print screen dari tampilan website yang dapat diakses di halaman <https://terong-bantul.desa.id/first> untuk memberi kemudahan akses informasi yang terkait Kalurahan Terong. Penyajian profil pemerintah desa pada bagian paling atas langsung menguraikan pilihan informasi pemerintahan secara umum untuk dikenalkan kepada masyarakat. Ada beberapa tujuh menu pilihan yang ada, diantaranya:

1. Profil

Berisi tentang informasi sejarah, wilayah, dan juga profil masyarakat Kalurahan Terong.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menjelaskan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di Kalurahan Terong.

3. Data Desa

Halaman ini berisi tautan menuju informasi mengenai Basis Data Desa. Ada dua jenis data yang dimuat dalam sistem ini, yakni basis data kependudukan dan basis data sumber daya desa

4. Pemerintah Desa

Memaparkan visi dan misi, pemerintah kalurahan BPD, dan data pamong Kalurahan Terong.

5. Produk Hukum

Memaparkan keputusan lurah, peraturan lurah desa, dan peraturan desa di Kalurahan Terong.

6. Dukuh

Halaman ini berisi identitas dukuh, data monografi, pendidikan, kesehatan, seni/budaya, industri dan kerajinan yang ada di Kalurahan Terong.

7. BUMKal

Dengan memaparkan pembentukan BUMDes yang terdapat pada Kalurahan Terong.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

a) Pembangunan

Sistem Informasi Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, dalam website Kalurahan Terong sudah ada menu agenda jadi masyarakat akan lebih mudah mengetahui program yang sudah terlaksanakan dan belum. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam penyusunan RPJMDes melibatkan masyarakat dan aspirasi dari masyarakatlah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan RPJMDes dan RKPDes.

Sistem Informasi Desa mempunyai manfaat yang sangat luas bahkan sebagai penjaring aspirasi maupun sebagai media pengawasan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak dari sistem informasi desa sangat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan pemerintah lebih transparan di mata masyarakat. dengan teknologi informasi yang merupakan teknologi masa kini untuk dapat menyatukan atau menggabungkan berbagai informasi, data dan sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi kegunaan seluruh manusia melalui penggunaan berbagai media dan peralatan komunikasi modern, selain itu instansi juga akan lebih mudah, dan cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

b) Pelayanan Publik

Sistem Informasi Desa ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Terong juga transparansi dalam hal informasi, berita, agenda, maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan Terong dapat diakses masyarakat umum. Adanya sistem informasi desa ini sangat membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kalurahan Terong. Sistem Informasi Desa berbasis online sangat membantu warga untuk menyampaikan berbagai informasi dan keluhan terkait dengan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena warga cukup menggunakan media sosial, maka akan memperoleh respon dari tangkapan sistem informasi desa. Dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Salah satu tugas utama kantor desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat. Sistem informasi desa dapat menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa menargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah kabupaten Bantul memberikan kesempatan kepada pihak Kalurahan Terong untuk mengelola website SID tersebut sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif, efisien, cepat, akurat, dan, transparan. Dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa lebih maksimal untuk menyediakan data-data seperti RPJMDes dan RKP serta informasi tentang desa

contohnya bencana desa pada *website* yang lengkap agar dalam pembangunan di Kalurahan Terong bisa lebih transparan kepada masyarakat.

2. Sebaiknya pada pemanfaatan Sistem Informasi Desa di Kalurahan Terong harus di maksimalkan lagi, sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat seperti surat menyurat contohnya surat keterangan usaha dan surat pengantar SKCK serta perizinan menikah dan domisili harus di maksimal kepada masyarakat. Adanya hal-hal tersebut dapat menjaga atau merawat hubungan interpersonal dengan masyarakat supaya keeratan hubungan sosial secara interaktif antara pemerintah dengan masyarakatnya tetap terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A, Nuriansah, A. 2022. Pendampingan dan Pelatihan Penggunaan Smart Village Guna Meningkatkan Pelayanan Desa Di Pekon Sukanegeri Jaya. *Jurnal Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS) Vol. 3 (1): 94-100*
- Akbar, F, Jaya, H. 2019. Implementasi Website Desa Dalam Pemberian Pelayanan Informasi Pembangunan. *Jurnal Teknologi dan Informasi Pemerintahan Vol 1 (1):42-51*
- Badri, M. 2016. Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal RISALAH, Vol 27 (2):62-73*
- Cahyono, A. 2022. Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Sistem Informasi Desa Krangkong. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Sosial Vol 3 (2):1-10*
- Faqih, M. 2019. Sistem Informasi Pelayanan Surat-Menyurat Berbasis Web Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Jurnal Sistem Informasi Vol 2 (1)*
- Herdida, D. 2019. Variabel Penerapan Smart Village Pada Desa-Desa Di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) Vol 21 (1):1 -16*
- Iqbal, A, Nugroho, D. 2020. Pelatihan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Vol 4 (1) 522-528*
- Iswanto, D. 2021. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah Desa dalam Membangun Smart Village Governance (Studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *Jurnal Eksekutif Vol 2 (1):101-108*
- Mayowan, Y. 2019. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik Vol 10 (1):14-23*
- Puspitasari, C, Dibyorini, R. 2021. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village Di Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) Vol. 23 (1): 213 – 226*
- Raihan, H, Amin, J. 2017. Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kalurahan (SI-Daleh) Di Desa Rapak Lembur. *Jurnal eJournal Ilmu Pemerintahan Vol 5 (3):1205-1218*
- Rozi, F, Listiawan, L. 2017. Pengembangan Website dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Vol 02 (02):107-112*
- Sari, I, Probonegoro, A. 2021. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi di Desa Air Anyir. *Jurnal Abdidas Vol 2 (3):597-602*

Subekti, T, Damayanti, R. 2019. Implementasi Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal (JPLAG) Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3 (1):18-28*

Taufik, M, Prastyo, D. 2009. Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Penduduk Tingkat Desa. *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Industri (SNTI) Vol 3 (2)*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

SUMBER DATA INTERNET

<https://terong-bantul.desa.id/first/artikel/32>

LAMPIRAN

1. Foto Bersama Narasumber











2. Foto Pelayanan Kepada Masyarakat





3. Foto Kantor Kalurahan Terong





PANDUAN WAWANCARA

Identitas informan :

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

- 1) Bagaimana pengembangan SID di Kalurahan Terong?
- 2) Mengapa SID ini perlu diterapkan?
- 3) Apa manfaat SID bagi masyarakat Kalurahan Terong?
- 4) Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan SID?
- 5) Tantangan apa yang dihadapi dalam pembangunan desa dengan adanya SID?
- 6) Apa yang menjadi acuan berkembangnya SID di Kalurahan Terong?
- 7) Bagaimana penerapan teknologi di Kalurahan Terong?
- 8) Apa saja yang perlu dilakukan dan dibutuhkan untuk dapat mewujudkan terbentuknya SID?
- 9) Faktor apa saja yang harus ditingkatkan supaya pengembangan SID ini bisa lebih maksimal?
- 10) Apa yang menjadi kekurangan dalam penerapan SID?
- 11) Apa saja masalah dalam pengembangan SID yang sudah diatasi atau belum teratasi?
- 12) Bagaimana pemerintah Kalurahan Terong dalam mengatasi masalah tersebut?
- 13) Mengapa penerapan SID di Kalurahan Terong ini belum maksimal?